

## DAFTAR PUSTAKA

- Aghnia Adzkia, CNN Indonesia, 2015. “DPRD Jakarta Tak Bahas Penyimpangan Pengadaan UPS versi BPK”, diakses Tanggal 25 Agustus 2015  
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150818185106-12-72977/dprd-jakarta-tak-bahas-penyimpangan-pengadaan-ups-versi-bpk/>.
- Arfi Bambani Amri, Arjuna Nusantara . 2013. “Kontroversi Dana Safari PKS di APBD Sumatera Barat”. Viva News, diakses Tanggal 25 April 2015  
(<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/397070-kontroversi-dana-safari-pks-di-apbd-sumatera-barat>).
- BPK Provinsi Sulawesi Tengah. 2014. “ DPRD Temukan Anggaran Siluman di APBD Kabupaten Bangkep ”, diakses tanggal 25 Agustus 2015  
(<http://www.palu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/DPRD-TEMUKAN-ANGGARAN-SILUMAN-DI-APBD-BANGKEP.doc.>)
- <http://uripsantoso.wordpress.com/2009/03/11/penganggaran-berbasis-kinerja/>  
Kbarek, Selfina, “Konsistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura”  
(<http://www.unhas.ac.id/perpustakaan/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=---selfinakba-194>) 21 April 2015.
- Kurniasih, Wiwik. 2007. “Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Dinas Kesehatan yang Bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya”  
(<http://eprints.undip.ac.id/17779/>) 28 April 2015.
- H, Lazwardi. 2009. “Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Aceh Tamiang (Tahun 2004-2009)”  
([http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2721:faktor-faktor-yang-berpengaruh-dalam-proses-penyusunan-apbd-di-kabupaten-aceh-tamiang&catid=21&Itemid=422](http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/index.php?option=com_content&view=article&id=2721:faktor-faktor-yang-berpengaruh-dalam-proses-penyusunan-apbd-di-kabupaten-aceh-tamiang&catid=21&Itemid=422))  
28 April 2015.
- Hotman, Atiek. 2005. “Analisis Peranan Bappeda dalam Menyusun APBD Berdasarkan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Menuju Kepemerintahan yang Baik di Kabupaten Tulang Bawang Lampung”.
- Sembiring, Benar Baik. 2009. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja (Studi Empris di Pemerintah Kabupaten Karo)”. (<http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4032/1/09E01980.24>) 24 Oktober 2015.
- Anthony, R. N. & Govindarajan, V. 2005. *Management Control System*, Twelfth Edition. Mc Graw Hill International Edition. New York.

- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Effendi, Sofian. 1990. *Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Era Tinggal Landas*. Solo.
- Mustopadidjaja, AR, 2003, *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta.
- Caiden and Wildavsky (1974). *Planning and Budgeting in Poor Countries*, Google Books. [www.Google.com](http://www.Google.com).
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2014*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2015*. Jakarta.

Pemerintah Kota Padang Panjang. 2014. *Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014*. Padang Panjang.

Pemerintah Kota Padang Panjang. 2013. *Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014*. Padang Panjang.

Pemerintah Kota Padang Panjang. 2013. *Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Panjang tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Padang Panjang Tahun 2014*. Padang Panjang.

Pemerintah Kota Padang Panjang. 2014. *Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Panjang tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Padang Panjang Tahun 2015*. Padang Panjang.

Pemerintah Kota Padang Panjang. 2012. *Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 900/433/Wako-PP/2012 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013*. Padang Panjang.

Pemerintah Kota Padang Panjang. 2013. *Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 900/448/Wako-PP/2014 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014*. Padang Panjang.